

Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara

Suci Ramadhani¹

Sucilsm328@gmail.com¹

Muhammad Yusra^{2*}

Myusra@unimal.ac.id²

Nurhasanah³

Nurhasanah@unimal.ac.id³

Ikhyanuddin⁴

Ikhyanuddin@unimal.ac.id⁴

^{1,2,3,4}*Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
Telepon 0645-44450/08116798545 Faks. 0645-44450*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada kepala dinas dan kepala sub bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara, (2) sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, hasil pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa: (3) partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara.

Kata kunci: *Partisipasi Anggaran, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kinerja Pemerintah Daerah*

Abstract

This study aims to determine how the influence of budget participation and regional financial accounting systems on the performance of local governments. This research was conducted at the Regional Apparatus Work Unit in Aceh Utara Regency. The data used in this study were primary data obtained by distributing questionnaires to the heads of agencies and heads of finance sub-divisions at the Regional Apparatus Work Unit in Aceh Utara Regency. The data analysis method used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS software version 26. The results showed that: (1) partial budget participation had a positive and significant effect on the performance of the local government of Aceh Utara Regency, (2) the regional financial accounting system partially had a positive and significant effect on the performance of the local government of Aceh Utara Regency. Meanwhile, the results of simultaneous testing obtained the results that: (3) the participation of the budget and

regional financial accounting system simultaneously or together had a significant effect on the performance of the local government of Aceh Utara Regency.

Keywords: *Budget Participation, Regional Financial Accounting System, and Local Government Performance*

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan daerah sendiri ditandai dengan terbitnya berbagai peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berbagai peraturan yang ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 serta lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Menurut Rahma (2020) peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut juga menegaskan adanya tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi anggaran ke publik berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas pelayanan publik seperti transparan, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, serta kewajiban. Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal, dengan begitu pemerintah diharuskan memberikan kinerja yang baik dalam mengelola keuangan daerah.

Kinerja organisasi sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian atas kinerja tersebut dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Pemerintah daerah memerlukan instrumen anggaran dalam mengelola sumber daya yang ada dengan baik, untuk mencapai kinerja yang baik yang diharapkan oleh masyarakat (Melia dan Sari, 2019).

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Pada organisasi sektor publik, anggaran dapat digunakan untuk menilai kinerja para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga anggaran mampu mempengaruhi perilaku dan kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kassa, dkk (2019) dimana kinerja pemerintah daerah merupakan kondisi dimana adanya peningkatan kinerja daerah melalui berbagai bentuk dengan adanya akuntabilitas penyelenggaraan yang dinilai oleh lembaga yang terkait.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah sendiri adalah partisipasi anggaran. Hal ini dikarenakan partisipasi anggaran sendiri merupakan tentang sejauhmana

tingkat keterlibatan pimpinan di dalam sebuah instansi dalam menyusun dan mengawasi penyusunan anggaran. Dengan adanya partisipasi anggaran tersebut menunjukkan adanya interaksi antara para bawahan dengan pimpinan dalam sebuah instansi. Menurut Nugroho dan Sumiyanti (2017) partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu yang secara langsung di dalamnya mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Cottalismewati, dkk (2022) menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur atau proses di dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan secara baik oleh pembuat keputusan dimasa yang akan datang. Menurut Antika, dkk (2020) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan dari pemerintah daerah. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Lestari dan Mutoriqoh (2020) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara di atas, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara sendiri terus mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2019 sendiri tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara mencapai Rp 279 miliar rupiah dan turun menjadi Rp 178 miliar rupiah pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih belum maksimal dalam bekerja mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator alat ukur tingkat kemandirian keuangan daerah selain dari Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, di mana dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan daerah dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang "Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara".

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* atau pemilik modal dan *agent* atau manajemen. *Agency theory* menjelaskan bahwa agen cenderung bertindak sesuai dengan kepentingannya dan mengabaikan kepentingan dari prinsipal (Tahar dan Kuncahyo, 2021). Hal ini yang menjadi dasar berbedanya informasi yang dimiliki oleh agen dan prinsipal, dimana agen mempunyai kendali atas informasi yang dimiliki daripada prinsipal karena agen terlibat langsung dalam setiap aktivitas entitas, keadaan seperti ini disebut asimetri informasi. Terdapat perbedaan yang timbul dikarenakan keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda yang disebut *conflict interest*. Timbulnya *conflict interest* ini dikarenakan adanya perilaku *opportunistic* dari keduanya. Perbedaan ini menimbulkan *agency cost* yang disebabkan perilaku konservatif oleh *principals* sebagai kontrol dari kinerja *agent* dalam menjalankan tanggung jawabnya. Konflik antara *agent* dan *principals* dapat diminimalkan dengan mekanisme pengendalian dan *monitoring* yang dapat memperkecil kesenjangan akibat perbedaan kepentingan antar keduanya yaitu dengan menerapkan *good governance*.

Teori keagenan (*Agency Theory*) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal (adanya situasi ketimpangan informasi) dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi *principal agent problem* di mana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency cost* (Gudono, 2017).

Hubungan partisipasi anggaran dengan partisipasi anggaran dimana diketahui bahwa dalam teori agensi (*agency theory*) menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan (Anthony dan Govindarajan, 2015). Jika bawahan (*agent*) yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran mempunyai informasi yang dimilikinya untuk membantu kepentingan instansi. Namun, sering keinginan atasan tidak sama dengan bawahan sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. Hal ini dapat terjadi misalnya jika dalam melakukan kebijakan pemberian *rewards* instansi kepada bawahan didasarkan pada pencapaian anggaran. Bawahan cenderung memberikan informasi yang bias agar anggaran mudah dicapai dan mendapat *rewads* berdasarkan pencapaian anggaran tersebut. Kondisi ini jelas akan menyebabkan senjangan anggaran.

Hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan teori *agency* dimana pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah, apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah.

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi dari pemerintah daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (Lestari dan Mutoriqoh, 2020). Menurut Sartika, dkk (2020) kinerja dari suatu pemerintah daerah merupakan suatu cerminan dari keberhasilan suatu kegiatan atau program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Cottalismewati, dkk (2022) menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dari pemerintah daerah sendiri yaitu tentang informasi masalah keuangan dan informasi masalah yang bukan keuangan. Sementara itu, Primastiwi, dkk (2020) juga menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah berhubungan dengan seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kinerja yang baik.

Partisipasi Anggaran

Partipasi anggaran merupakan suatu proses dimana organisasi atau instansi yang kinerjanya dievaluasi dalam memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran, terlibat dan

memiliki pengaruh dalam penyusunan target anggaran. Partisipasi anggaran adalah suatu perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung (Wiguna, dkk, 2017). Menurut Nugroho dan Sumiyanti (2017) partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka.

Melia dan Sari (2019) menjelaskan bahwa partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh pimpinan dan bawahan berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban mereka masing-masing. Partisipasi anggaran sendiri memberikan manfaat dalam mendorong kreativitas dan meningkatkan tanggung jawab. Sementara itu, Khasanah dan Kristanti (2020) juga menjelaskan bahwa partisipasi penyusunan anggaran merupakan proses pengambilan keputusan secara bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya, dengan kata lain pekerja atau pimpinan tingkat bawah memiliki suatu dalam prosesnya.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

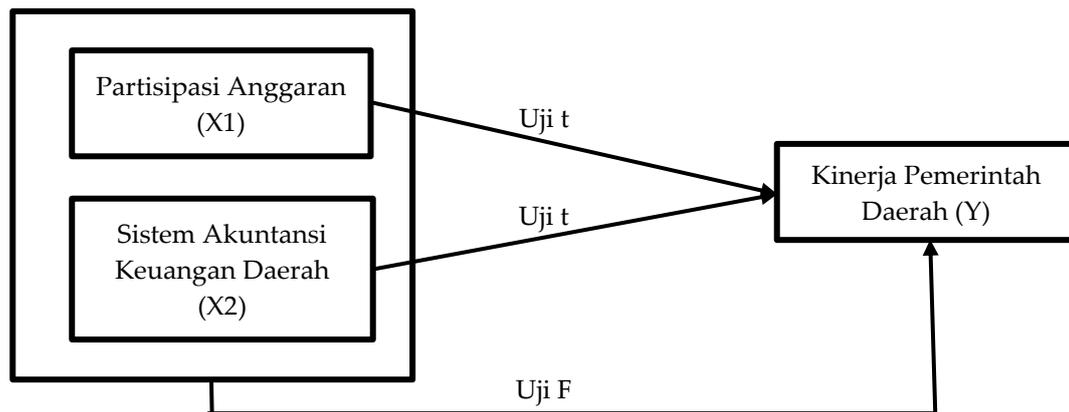
Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah (Mahmudi, 2016). Menurut Antika, dkk (2020) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Halim (2017) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sementara itu, Sartika, dkk (2020) juga menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebuah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan suatu proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur yang berupaya untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas serta dapat diandalkan oleh pemerintah daerah dalam mengambil keputusan tentang rancangan penyusunan anggaran dimasa yang akan datang, sehingga setiap penyusunan laporan keuangan akan dapat diandalkan oleh pengguna anggaran dalam menentukan keputusan rancangan anggaran.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori suatu masalah tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah seperti gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka yang menjadi hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara.
- H₂ : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara.
- H₃ : Partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara.

METODE

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di SKPD Kabupaten Aceh Utara. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Populasi sering juga disebut dengan *universe*. Anggota populasi sendiri dapat berupa benda hidup maupun benda mati ataupun manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *non probability sampling* atau *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *purposive sampling* merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel yang sesuai dengan pengetahuan responden dan sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 responden dari 30 Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara yaitu kepala dinas dan kepala sub bagian keuangan yang ada di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, di dalam definisi operasional variabel sendiri akan dijelaskan tentang variabel yang digunakan beserta dengan definisi dan indikator serta skala yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut (Syahza, 2021). Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja pemerintah daerah berhubungan dengan seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kinerja. (Primastiwi, dkk, 2020)	1. Perencanaan 2. Investigasi 3. Koordinasi 4. Evaluasi 5. Supervisi 6. <i>Staffing</i>	<i>Likert</i>
Partisipasi Anggaran (X1)	Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan yang meliputi pemberian pendapat, pertimbangan, dan usulan dari bawahan dalam mempersiapkan dan merevisi anggaran di dalam pemerintah daerah. (Primastiwi, dkk, 2020)	1. Keterlibatan pemimpin dalam penyusunan anggaran 2. Wewenang pemimpin dalam penyusunan anggaran 3. Keterlibatan pemimpin dalam pengawasan 4. Keterlibatan pemimpin dalam tujuan pelaksanaan	<i>Likert</i>
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencarian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. (Antika, dkk, 2020)	1. Basis akuntansi 2. Unsur-unsur laporan realisasi anggaran 3. Penyusunan APBD 4. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP 12 Tahun 2019	<i>Likert</i>

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Utara. Analisis

regresi linier berganda dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 26. Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Pemerintah Daerah
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 X_1 : Partisipasi Anggaran
 X_2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Item	r_{hitung}	Nilai Sig.	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,804	0,000	0,2542	Valid
X1.2	0,666	0,000	0,2542	Valid
X1.3	0,779	0,000	0,2542	Valid
X1.4	0,689	0,000	0,2542	Valid
X2.1	0,648	0,000	0,2542	Valid
X2.2	0,708	0,000	0,2542	Valid
X2.3	0,804	0,000	0,2542	Valid
X2.4	0,831	0,000	0,2542	Valid
Y.1	0,680	0,000	0,2542	Valid
Y.2	0,642	0,000	0,2542	Valid
Y.3	0,504	0,000	0,2542	Valid
Y.4	0,511	0,000	0,2542	Valid
Y.5	0,546	0,000	0,2542	Valid
Y.6	0,440	0,000	0,2542	Valid

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator dari variabel partisipasi anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan memperoleh nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

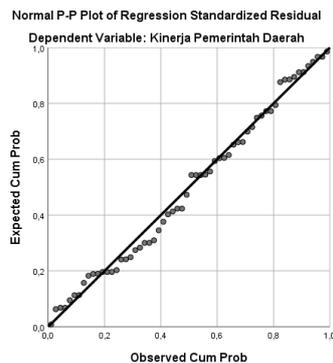
No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Partisipasi Anggaran	0,714	Reliabel
2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,735	Reliabel
3	Kinerja Pemerintah Daerah	0,653	Reliabel

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data



Berdasarkan hasil *normality probability plot* pada gambar di atas, maka dapat dilihat bahwa titik-titik dalam grafik tersebut menyebar mengikuti arah garis diagonal atau berada disekitar garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Diagnostic		Keterangan
	VIF	Tolerance	
Partisipasi Anggaran	1,636	0,611	Bebas Multikolinearitas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1,636	0,611	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai VIF yang diperoleh lebih kecil 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Nilai Signifikan	Keterangan
1	Partisipasi Anggaran	0,122	Bebas Heteroskedastisitas
2	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,317	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *park* pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa variabel partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Oleh karena itu, maka dapat

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Parsial

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	12,640	1,836		6,868	0,000
Partisipasi Anggaran	0,280	0,129	0,263	2,175	0,034
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,481	0,116	0,504	4,167	0,000

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji secara parsial yang telah dilakukan pada tabel di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel partisipasi anggaran memperoleh nilai signifikan sebesar 0,034 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,034 < 0,05$) dan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,175 atau lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,00030 ($2,175 > 2,00030$) serta memiliki nilai koefisien sebesar 0,280. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara diterima (H_1 diterima).
2. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,167 atau lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,00030 ($4,167 > 2,00030$) serta memiliki nilai koefisien sebesar 0,481. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara diterima (H_2 diterima).

Uji Secara Simultan

Tabel 7. Hasil Uji Secara Simultan

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig</i>
<i>Regression</i>	135,545	2	67,773	27,322	0,000
<i>Residual</i>	141,388	57	2,480		
<i>Total</i>	278,933	59			

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji secara simultan pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan memperoleh nilai F_{hitung} sebesar 27,322 atau lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu 3,15 ($27,322 > 3,15$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan

sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara diterima (H_3 diterima)

Uji Koefisien Determinasi dan Uji Korelasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi dan Korelasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R-Square</i>	<i>Adjusted R-Square</i>	<i>Std. Error of The Estimate</i>
1	0,700	0,489	0,472	1,575

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dan korelasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *adjusted r square* yang diperoleh adalah sebesar 0,472 yang menunjukkan bahwa variabel kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dipengaruhi oleh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 47,2%, sedangkan sisanya sebesar 56,8% variabel kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, untuk nilai *R square* diperoleh sebesar 0,489 yang menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara variabel partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mempengaruhi variabel kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dalam kategori sedang karena berada pada korelasi 0,40 – 0,599.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yang lebih satu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 12,640 + 0,280X_1 + 0,481X_2$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Pemerintah Daerah
 X_1 : Partisipasi Anggaran
 X_2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 12,640. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara juga akan konstanta sebesar 12,640.
2. Partisipasi anggaran memperoleh nilai koefisien sebesar 0,280 yang menunjukkan bahwa apabila partisipasi anggaran di Kabupaten Aceh Utara meningkat 1%, maka tingkat kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Utara juga akan mengalami peningkatan sebesar 28%.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai koefisien sebesar 0,481 yang menunjukkan bahwa apabila sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Utara meningkat 1%, maka tingkat kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Utara akan meningkat sebesar 48,1%.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel partisipasi anggaran memperoleh nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan serta memperoleh nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Utara diterima (H_1 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Muhsin dan Dwita (2022) tentang pengaruh partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial, di mana dalam penelitiannya juga menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Kemudian hasil yang sama juga diperoleh oleh Ismail dan Mamulati (2020) tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan yang juga menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan serta memperoleh nilai koefisien yang positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Utara diterima (H_2 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Lestari dan Mutoriyoqoh (2020) tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi, dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kendal. Kemudian penelitian lainnya yang memperoleh hasil yang sama dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Kertiani, dkk (2020) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja instansi pemerintah pada kantor dinas Pemerintah Kabupaten Badung yang juga menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan memperoleh nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Utara diterima (H_3 diterima).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Primastiwi, dkk (2020) tentang pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah

terhadap kinerja pemerintah daerah yang menemukan bahwa partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian lainnya yang memperoleh hasil yang sama dengan penelitian sekarang ada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Cottalismewati, dkk (2022) tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah yang juga menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara diperoleh hasil bahwa partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara. Kemudian hasil secara simultan diperoleh hasil bahwa partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara.

Daftar Pustaka

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2015). *Management Control System* (2nd ed.; K. Tjakrawala and Krista, eds.). Jakarta: Salemba Empat.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232.
- Cottalismewati., Asmeri, R., & Silvera, D. L. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Pareso Jurnal*, 4(1), 149-168.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2017). *Analisis dan Multivariate*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, R., & Mamulati, I. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Kawasa*, 10(1), 51–64.
- Kassa, E. L., Asnawai, M., & Pangayouw, B. (2019). Analisis Pengaruh Partisipasi dan Peran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(1), 15-32.
- Kertiani, N. M., Kusumawati, N. P. A., & Ayu, P. C. (2020). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Badung. *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–11.
- Khasanah, S. N., & Kristanti, I. H. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kapasitas Individu, Self Esteem, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Desa di Kecamatan Petanahan. *JIMMBA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(3), 411–430.
- Lestari, U. P., & Mutoriogh. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi, dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Kabupaten Kendal). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 43–53.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (3rd ed.). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068-1079.
- Muhsin, R., & Dwita, S. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(1), 150-164.
- Nugroho, P. S., & Sumiyanti, T. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi dan Politik Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(2), 104-118.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2005 Tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah ahun Anggaran 2005 Menteri Keuangan.
- Primastiwi, A., Wardani, D. K., & Kitna, H. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kinerja Sektor Publik dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(2), 24-35.
- Sartika, D., Monita, D. C., & Ilyas, A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD di Kota Padang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 195-214.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., & Kuncahyo, H. H. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Kompensasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 45-55.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wiguna, L. Y. P., Sukartha, I. M., & Astika, I. B. P. (2017). Pengaruh Partipasi Penyusunan Anggaran Pada Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi, Motivasi, dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(8), 3041-3070.